

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Konservasi

Edisi : 17 Januari 2012
Halaman : 22

KAWASAN KONSERVASI

Bunati Harus Bebas Aktivitas Pelabuhan Khusus

BANJARMASIN, KOMPAS - Keberadaan pelabuhan khusus batubara di kawasan Pantai Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada terumbu karang di tempat itu. Sebagai daerah konservasi, harusnya Bunati bersih dari aktivitas pelabuhan khusus dan lalu lintas angkutan batubara.

"Sebagai kawasan cadangan konservasi laut, Bunati harus bersih dari aktivitas yang bisa mengancam biota laut. Jika tidak, kerusakan yang lebih parah akan terjadi," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Hegar Wahyu Hidayat, Senin (16/1).

Menurut Hegar, sejauh ini penelitian mendalam soal kerusakan terumbu karang di kawasan itu belum dilakukan. Namun, berdasarkan informasi dari masyarakat, terumbu di daerah itu sudah mengalami degradasi. Terbukti hasil tangkapan ikan nelayan yang terus berkurang.

Kondisi rusaknya terumbu karang disinyalir terjadi akibat aktivitas bongkar muat batubara dan lalu lintas tongkang. "Pecahan batubara berukuran kecil-kecil yang tercecer dalam kegiatan bongkar muat juga bisa mengendap di laut dan merusak terumbu karang," ujar Hegar.

Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel menyebutkan, terumbu karang yang rusak parah di kabupaten Kota Baru mencapai 200-an hektar, dan 64 ha lainnya di Tanah Bumbu. Adapun yang mengalami kerusakan sedang seluas 1.200-an ha di Kota Baru dan 50-an ha di Tanah Bumbu. Sementara yang kondisinya baik seluas 11.000-an ha di Kota Baru dan 179 ha terdapat di Tanah Bumbu.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalsel Rakhmadi Kurdi mengaku, pihaknya sudah menolak analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sejumlah perusahaan batubara untuk membuat pelabuhan khusus di Bunati. Satu pelabuhan milik PT BIB kini tengah diaudit Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah menolak dua amdal, masing-masing PT TIA dan BBC karena lokasinya berada di cadangan konservasi laut daerah. Namun, kedua perusahaan itu diberi izin oleh kabupaten hanya dengan mengajukan dokumen UKL (upaya kelola lingkungan) dan UPL (upaya pengelolaan lingkungan)," ujar Rakhmadi.

Farida Hanum, Ketua Gabungan Kelompok Tani Maju Bersama, mengingatkan, Pemkab Kutai Kartanegara mencegah aktivitas tambang yang berdekatan dengan pertanian. Bahkan, harus berani menindak tegas penambangan yang mencemari sungai dan memicu terjadinya banjir.

Saat ini, 100 hektar lebih sawah dan kolam ikan milik warga Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dilanda banjir. "Saat tambang belum ada di Samboja, sawah dan kolam ikan aman saja. Walau hujan deras, sungai tak meluap parah. Sekarang, Samboja dikelilingi tambang batubara dan masalah pun terjadi," kata Farida. Kini, sebanyak 687 perizinan kuasa pertambangan (KP) ada di Kaltim. Sekitar 91 izin di antaranya diterbitkan di Samboja. (WER/PRA)